



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 347);
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN,
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
- BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

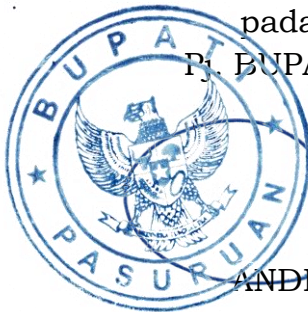
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 5 Agustus 2024

P. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;

- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;
- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XXX. INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan/ sasaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Penyusunan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara RENJA dengan dokumen perencanaan lainnya.

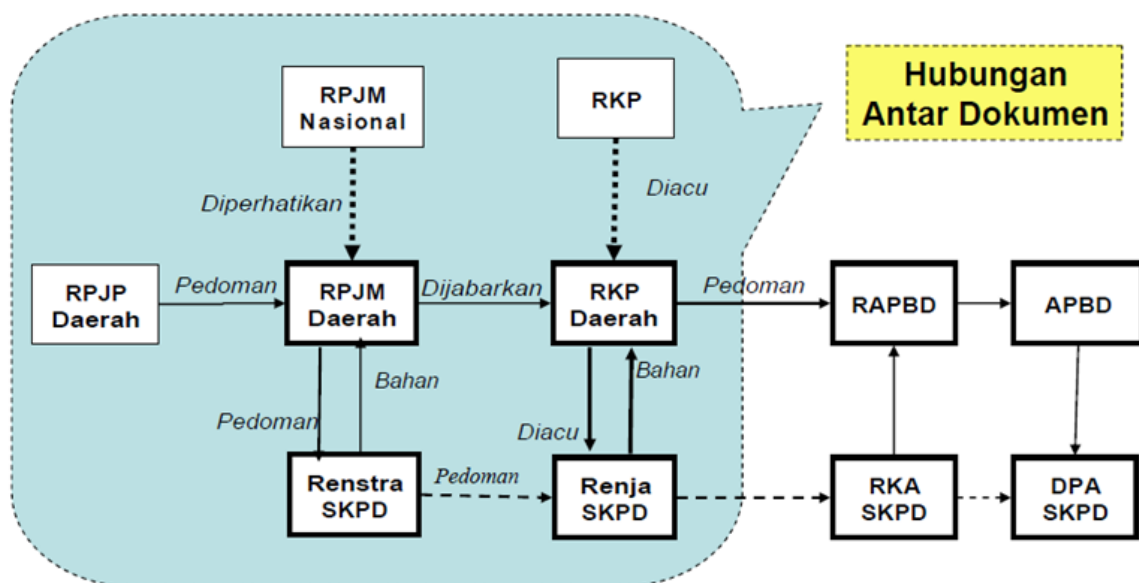


Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025 memuat indikasi program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dengan mengacu pada tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana seringkali tidak mendapat perhatian yang optimal sebagaimana fungsi perencanaan, pengendalian maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut terjadi karena selama ini ada anggapan bahwa pengawasan itu merepotkan, mencari-cari kesalahan/kelemahan, sudah ada unit kerja yang menangani dan lain-lainnya. Sementara itu dalam pelaksanaannya pengawasan meliputi pemeriksaan, pengendalian, evaluasi maupun pembinaan terkait dengan proses prosedur dan rencana pelaksanaan tugas pada setiap satuan kerja.

Pengawasan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka penghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah tetapi juga untuk menilai :

1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,
2. Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya Untuk pelaksanaan kegiatan organisasi (PD),
3. Efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421));
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian Penghargaan dan / atau insentif inovasi daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Tugas dan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, maka maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
2. Sebagai arah dan acuan dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan yang akan dicapai termasuk kebutuhan pendanaanya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut input, output, outcomes.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkeinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Berikut disampaikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	-				100%	100%	100%
60101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/su bkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%					100%	100%	100%
6010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 lapora n					5 laporan	5 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk an	100%					100%	100%	100%
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560 orang- bulan					560 Orang- bulan	560 orang- bulan	100%
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokum en					13 dokumen	12 dokumen	92,30%
6010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokum en					12 dokumen	12 dokumen	100%
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%					100%	100%	100%
6010120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket					1 Paket	1 Paket	100%
6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	41 Orang					26 Orang	26 Orang	63,41%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6010120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	41 Orang					41 Orang	41 Orang	100%
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket					4 Paket	4 Paket	100%
6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket					7 Paket	7 Paket	100%
6010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket					8 Paket	8 Paket	100%
6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	12 Dokum en					12 Dokumen	12 Dokumen	100%
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Lapora n					75 Laporan	75 Laporan	88,23%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terrealisasi	100%					100%	100%	100%
6010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Paket					4 paket	4 paket	200%
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit					19 unit	19 unit	633%
6010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	6 unit					11 unit	11 unit	183%
60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%					100%	100%	100%
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Lapora n					12 Laporan	12 Laporan	100%
6010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Lapora n					12 Laporan	12 Laporan	100%
6010120803	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lapora n					4 Laporan	4 Laporan	133%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%					100%	100%	100%
6010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit					15 Unit	15 Unit	100%
6010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit					50 Unit	50 Unit	100%
60101209009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilita si	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
60102	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	92%					89%	89%	96,74%
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100%					100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	8 Lapora n					8 Laporan	8 Laporan	100%
6010220102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Lapora n					8 Laporan	8 Laporan	100%
6010220103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57 Lapora n					57 Laporan	57 Laporan	100%
6010220104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Lapora n					116 Laporan	116 Laporan	100%
6010220105	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	16 Lapora n					16 Laporan	16 Laporan	100%
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepa katan					1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	100%
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokum en					4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%					100%	100%	100%
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Lapora n					1 Laporan	1 Laporan	100%
6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Lapora n					20 Laporan	20 Laporan	200%
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	56%					52%	52%	92,85%
60103202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%					100%	100%	100%
6010320201	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perang kat daerah					57 perangka t daerah	57 perangkat daerah	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Realisasi Perangka t Daerah Tahun n- 2 (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6010320202	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiata n					12 kegiatan	12 kegiatan	100%
6010320203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	2 perang kat daerah					2 perangka t daerah	2 perangkat daerah	100%

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
I.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	89%	96,74%	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai SOP diberikan batas waktu sekitar 3 bulan setelah LHP terbit. Untuk pemeriksaan yang dilakukan pada akhir tahun sehingga tidak lanjut melewati tahun berikutnya. Hal ini yang menjadi salahsatu pertimbangan target yang ditentukan tidak 100%.	Hal ini sudah kami tindak lanjuti dengan baik melalui surat, telepon/ datang langsung/Stressing kepada Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data TLHP BPK dan APIP Kabupaten Pasuruan.
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00%	100,00%	Integritas dan Komitmen selaku APIP dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan. SDM yang terbatas	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	Integritas dan Komitmen selaku APIP dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan. SDM yang terbatas	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	Integritas dan Komitmen selaku APIP dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan. SDM yang terbatas	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
c	Reviu Laporan Kinerja	100,00%	100,00%	Integritas dan Komitmen selaku APIP dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan. SDM yang terbatas	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
d	Reviu Laporan Keuangan	100,00%	100,00%	Integritas dan Komitmen selaku APIP dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan. SDM yang terbatas	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
e	Pengawasan Desa	100,00%	100,00%	Integritas dan Komitmen selaku APIP dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan. SDM yang terbatas	Melaksanakan evaluasi secara rutin untuk mengendalikan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan
f	Kerjasama Pengawasan Internal	100,00%	100,00%	Kesepakatan Saber Pungli dengan Polres Kota Pasuruan dijadikan satu kesepakatan dengan Polres Kab. Pasuruan, tidak berdiri sendiri karena hanya beberapa wilayah saja.	Melaksanakan Koordinasi dan kegiatan bersama dengan pihak-pihak terkait
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100,00%	100,00%	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan.	Hal ini sudah kami tindak lanjuti dengan baik melalui surat, telepon/ datang langsung/Stressing kepada Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data TLHP BPK dan APIP Kabupaten Pasuruan.
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	Inspektorat Daerah telah memiliki layanan pengaduan Masyarakat, konsultasi, Whistle Blowing, Saber Pungli, UPG, yang menjadi satu dalam Aplikasi SEPAKAT. Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai <i>Consulting, Quality Assurance and Early Warning System</i> .	Menangani/ melakukan pemeriksaan atas Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang masuk Melaksanakan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	100,00%	100,00%	Kerjasama Tim TPKD dalam menyelesaikan permasalahan	Menangani/ melakukan pemeriksaan atas permasalahan yang terkait dengan asset negara.
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00%	200,00%	Inspektorat Daerah telah memiliki layanan pengaduan Masyarakat, konsultasi, Whistle Blowing, Saber Pungli, UPG, yang menjadi satu dalam Aplikasi SEPAKAT.	Menangani/ melakukan pemeriksaan atas Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang masuk Melaksanakan Koordinasi dengan pihak- pihak terkait. Sosialisasi Aplikasi SEPAKAT.
II.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	52%	92,85%	Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai <i>Consulting, Quality Assurance and Early Warning System</i> . Belum optimalnya Implementasi AKIP pada Perangkat Daerah Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah Belum memiliki P2UPD.	Menjalin komunikasi dan koordinasi/konsultansi dengan Pihak- pihak terkait seperti BPKP Provinsi Jawa Timur, KPK. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi semaksimal mungkin.
1.	Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai <i>Consulting, Quality Assurance and Early Warning System</i> . Belum memiliki P2UPD.	Menjalin komunikasi dan koordinasi/konsultansi dengan Pihak- pihak terkait seperti Perangkat Daerah, BPKP Provinsi Jawa Timur, KPK. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi semaksimal mungkin.
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100,00%	100,00%	Belum optimalnya Implementasi AKIP pada Perangkat Daerah Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah Belum memiliki P2UPD.	Menjalin komunikasi dan koordinasi/konsultansi dengan Pihak- pihak terkait seperti Perangkat Daerah dan BPKP Provinsi Jawa Timur. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi semaksimal mungkin.

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100,00%	100,00%	Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai <i>Consulting, Quality Assurance and Early Warning System</i> .	Melaksanakan Monev dan Verifikasi dalam pemenuhan MCP KPK secara rutin
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100,00%	100,00%	Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai <i>Consulting, Quality Assurance and Early Warning System</i> . Belum memiliki P2UPD.	Melaksanakan pendampingan ZI semaksimal mungkin Melaksanakan Sosialisasi UPG

Dari tabel diatas, berikut penjelasan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Pasuruan :

1. Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pasuruan, DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan nilai anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp. 14.511.732.778,-** sedangkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 13.129.357.377,-**, Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar **90,47%**. Anggaran Belanja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan terdiri atas 3 Program dan 10 kegiatan.

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selengkapnya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program ini memiliki nilai anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.540.269.308,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 8.482.930.941,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 88,92%. Program ini mempunyai 7 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.824.000	66.640.500	89,06
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.818.060.620	5.946.625.074	87,22
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	710.599.000	621.188.500	87,42
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.211.982	915.130.419	95,60
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339.475.570	334.878.928	98,65
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.633.313	140.937.712	84,58
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.464.823	457.529.808	96,63

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini memiliki nilai anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.437.520.140,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 4.161.195.403,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,77%. Program ini mempunyai 2 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.115.352.640	3.905.148.333	94,89
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	322.167.500	256.047.070	79,48

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini memiliki nilai anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 533.943.330,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 485.231.033,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90,88%. Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan nilai anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendampingan Dan Asistensi	533.943.330	485.231.033	90,88

2. Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Secara umum, alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta belanja untuk menunjang Program dan Kegiatan. Berikut adalah alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 :

Pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki anggaran sebesar Rp 14.511.732.778,-. Anggaran tersebut dialokasikan sebanyak 66,27% untuk menunjang Program, Kegiatan dan sub kegiatan, sedangkan 33,72% dialokasikan pada Belanja untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai. Anggaran tersebut kemudian dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (APBD di atas 2 triliun, alokasi anggaran APIP minimal 0,50% atau paling sedikit sebesar 15 milyar) pada Tahun 2023 ini belum memenuhi amanat tersebut (masih 0,36% dari total anggaran APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Rp. 3.991.743.925.884,-) sehingga diharapkan pada Tahun 2024 dapat terwujud.

Rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan diperbandingkan dengan total jumlah anggaran Belanja Langsung pada Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal BB	533.943.330,-	3,67%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	4.437.520.140,-	30,57%
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	9.540.269.308,-	65,74%

Pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tahun 2023, kemudian diperbandingkan nilai capaiannya sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2023			Anggaran 2023 (Rp.)		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Penyerapan %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal BB	100%	100%	100,00	533.943.330,-	485.231.033,-	90,88
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	48%	57,89%	120,60	4.437.520.140,-	4.161.195.403,-	93,77
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,50	84,15	98,42	9.540.269.308,-	8.482.930.941,-	88,92

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya, sebagaimana tabel dibawah ini :

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB	100	90,88	9,12%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	120,60	93,77	26,83%
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	98,42	88,92	9,5%

Dari tabel diatas persentase efisiensi wajar dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditentukan. maka dari 3 (IKU) tersebut tidak ada yang masuk kedalam kategori tidak efisien (minus).

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik, serta terjalinnya koordinasi lintas sektoral yang optimal, baik dilingkup internal maupun dengan eksternal.

Adapun untuk target nilai SAKIP Inspektorat Daerah pada Target Akhir Renstra tidak sama dengan Target PK Inspektorat Daerah tahun 2023 dikarenakan target pada PK Inspektorat Daerah tahun 2023 telah mengalami perubahan secara realistis dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya (Tahun 2022 nilai 85,39 dengan kategori A (Memuaskan)).

Atas dasar tersebut, di masa yang akan datang perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat serta pemutakhiran data pendukung.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	IKU Renstra 2024-2026											
a.	Nilai Maturitas SPIP			Level 3 (3.110)	Level 3 (3.120)	Level 3 (3.130)	Level 3 (3.140)	Level 3 (3.147)		Level 3 (3.152)	Level 3 (3.154)	Realisasi Skor Maturitas SPIP Tahun 2023 melebihi target renstra 2026, sehingga target skor renstra tahun 2024 sudah tidak relevan, maka pada Perjanjian Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 target skor Maturitas SPIP ditingkatkan / dirubah menjadi (3.150) dengan level tetap yaitu level 3. Adapun level tidak dinaikkan karena pada level 3 ini masih banyak dokumen-dokumen yang perlu dipenuhi untuk mempertahankan level dan skor.
b.	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			16,70	16,80	16,85	16,90	16,74		16,85	16,90	Target renstra masih relevan
c	Nilai Kapabilitas APIP			Level 3 (3.000)	Level 3 (3.010)	Level 3 (3.020)	Level 3 (3.030)	Level 3 (3.000)		Level 3 (3.020)	Level 3 (3.030)	Target renstra masih relevan
d	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			85,50 (A)	85,55 (A)	85,55 (A)	85,55 (A)	84,15 (A)		85,55 (A)	85,55 (A)	Dikarenakan realisasi tahun 2023 tidak mencapai target, maka target tahun 2024 masih relevan.

Dari tabel diatas, dapat dinalisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

2.2.1 Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga dengan cara membandingkan antara realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya. Pengukuran Kinerja Tahun 2023, terhadap sasaran maupun target indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2023

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
	Tujuan :				
	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. NILAI SAKIP (PEMDA)	A (80)	BB (77.53)	96,91%
		2. OPINI BPK	WTP	WTP	100%
	Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB	100 %	100 %	100%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	48 %	57,89%	120,60%
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,50	84,15	98,42%

Berdasarkan tabel diatas Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 mengalami perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sejak pertengahan tahun 2021 dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah. Dari 3 (tiga) IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dapat diperbandingkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB pada Tahun 2023 sudah dilakukan penilaian dengan hasil realisasi 100% atau sebanyak 55 Perangkat Daerah, **sesuai target** yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%.

2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP

Pada penilaian SPIP Tahun 2023 ini menggunakan Aplikasi SPIP Terintegrasi dari BPKP Provinsi Jatim dan sesuai petunjuk Suplemen Penilaian dari BPKP Pusat, maka yang dinilai adalah Perangkat Daerah yang mendukung Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dari unsur penilaian T1 s/d T4, Sehingga pelaksanaan penilaian di fokuskan kepada Dinas, Badan, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, sedangkan untuk kecamatan hanya dilakukan analisis register resiko saja. Untuk itu hasil penilaian untuk perangkat Daerah sebagai berikut :

Pada Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif pada Tahun 2023 ini meningkat. Target kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar **48%** atau sebanyak 26 Perangkat Daerah, adapun realisasinya adalah sebesar **57,89%** atau sebanyak 33 Perangkat Daerah.

Jika Dilihat Dengan Target Capaian Kinerja Yang Telah Ditetapkan Untuk Tahun 2023 Yaitu **48%**, Capaian Tersebut **Sudah Memenuhi Target.**

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah pada Tahun 2023 sudah dilakukan penilaian dengan realisasi nilai 84,15 dengan kategori A (Memuaskan). Nilai tersebut **tidak mencapai target** yang ditentukan sehingga capaian kinerja Tahun 2023 98,42%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan (Tahun 2022 nilai 85,39 dengan kategori A (Memuaskan)). Akan tetapi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sudah realistis dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

2.2.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2023 dengan target pada kinerja akhir periode berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023. Hal ini diukur berdasarkan tingkat kemajuan pada sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2023 dibandingkan target pada akhir periode Renstra secara lebih detail dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Target Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2023	Realisasi 2023	% Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
	Tujuan :				
	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. NILAI SAKIP (PEMDA)	A (80)	BB (77.53)	96,91%
		2. OPINI BPK	WTP	WTP	100%
	Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB	100 %	100 %	100%
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	48 %	57,89%	120,60%
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,50	84,15	98,42%

Berdasarkan data pada tabel tersebut, untuk target nilai SAKIP Inspektorat Daerah pada Target Akhir Renstra tidak sama dengan Target PK Inspektorat Daerah tahun 2023 dikarenakan target pada PK Inspektorat Daerah tahun 2023 telah mengalami perubahan secara realistis dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

2.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan tindak lanjut atas RPJMD Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan dijabarkan dalam Renstra Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Target dari masing-masing IKU tersebut mencantumkan capaian untuk masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga **tidak dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional**.

Tabel 2.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Capaian Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan :					
	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. NILAI SAKIP (PEMDA)	A	BB	-	Nihil
		2. OPINI BPK	WTP	WTP	-	Nihil
	Sasaran :					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB	100 %	100 %	-	Nihil
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	48 %	57,89%	-	Nihil
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,50	84,15	-	Nihil

2.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Secara umum dapat dijelaskan capaian kinerja dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil capaian melebihi target pada seluruh indikator kinerja utama tersebut. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Tahun 2023 :

1. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan renaksi yang telah disusun.
2. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan.
3. Tersedianya SDM yang berkompeten.
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Tahun 2023 :

1. Pencapaian kinerja dilaksanakan sesuai jadwal namun ada beberapa kegiatan yang masih menunggu petunjuk dari kementrian dalam pelaksanaan evaluasi sehingga jadwal yang telah ditentukan mengalami perubahan, contoh SAKIP RB.
2. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan sehingga mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan.

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

1. Penyusunan Program Kerja dilaksanakan lebih awal sehingga anggaran pada RKPD tahun berikutnya dapat mengakomodir kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh APIP, serta tugas-tugas dari hasil evaluasi dan Mandatori.
2. Lebih Intens menjalin kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah serta peningkatan Kapabilitas APIP.
3. Menjalni koordinasi dengan BPK untuk memperoleh arahan terhadap rekomendasi-rekomendasi yang sudah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun.

4. Dukungan komitmen Kepala Daerah yang selalu menekankan pentingnya pelaksanaan TLHP sehingga dapat mendorong Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan hasil pemeriksaan BPK dengan melaksanakan kegiatan Rakorwas.
5. Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah melalui Sosialisasi UPG dan MCP KPK.
6. Melaksanakan Sosialisasi Layanan Pengaduan Masyarakat “SEPAKAT”.
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala dan terdokumentasi.
8. Pemenuhan Kuantitas maupun peningkatan kualitas aparat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan melalui koordinasi dengan BKPSDM serta pelaksanaan Diklat Teknis.

Alokasi Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian %	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Penyerapan %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal BB	100%	100%	100,00	533.943.330,-	485.231.033,-	90,88
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	48%	57,89%	120,60	4.437.520.140,-	4.161.195.403,-	93,77
3.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	85,50	84,15	98,42	9.540.269.308,-	8.482.930.941,-	88,92

Skala Predikat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA REALISASI
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51% - 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya hasil SAKIP pada Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya penanganan / penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan
4. Keterbatasan jumlah Auditor mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan, idealnya memiliki 54 auditor dan memiliki P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah), sedangkan kondisi saat ini hanya memiliki 20 Auditor dan belum memiliki P2UPD.
5. Keterbatasan Anggaran dimana Anggaran Inspektorat Daerah belum sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2022 bahwa anggaran Inspektorat Daerah seharusnya sebesar 0,50% dari total APBD Kabupaten Pasuruan, sehingga salah satu dampaknya mempengaruhi peningkatan kompetensi APIP.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
3. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK.
4. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi di bidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

5. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor/aparatur fungsional pengawasan pada Pendidikan dan pelatihan teknis dengan durasi 120 jam sesuai bidang tugas masing-masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
2. Tersedianya SDM yang berkompeten;
3. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi.

Faktor Kelemahan :

1. Belum idealnya distribusi pemeranan jabatan dalam Tim pembinaan dan pengawasan;
2. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.

Faktor Tantangan :

1. Adanya pergeseran peran Inspektorat Daerah dari Watchdog menjadi penjamin mutu (Quality Assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
2. Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
3. Peningkatan tingkat Maturitas SPIP level 3;
4. Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju Level 3;
5. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, bersih dari KKN.

Faktor Peluang :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah;
2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap tata Kelola Pemerintahan yang baik;
3. Dukungan Pihak Internal APIP dan Eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur);
4. Sumber daya manusia yang berintegritas.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN dikarenakan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance and clean government*.
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP dan RB Tematik oleh seluruh Perangkat Daerah.
4. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance (Penjamin Mutu) dan Consulting Partner (Konsultan).
7. Peningkatan Kapabilitas APIP.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan.

Dalam rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sudah berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektora t Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	<u>100%</u>	11.022.541.547	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	<u>100%</u>	13.589.152.964	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektora t Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	246.375.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	392.010.000	
1.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	246.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	392.010.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektora t Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	6.767.766.291	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	9.617.373.277	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560 orang-bulan	6.425.016.291	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	560 orang - bulan	9.379.072.593	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	268.830.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	7 dokumen	165.340.684	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	73.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	72.960.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektora t Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	1.170.570.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	936.092.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	890.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	550.750.000	
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	280.170.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	385.342.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektora t Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	1.115.165.022	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%	848.343.207	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	37.915.358	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	52.633.647	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	300.290.303	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 Paket	234.601.480	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	110.195.361	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	82.008.080	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	9.600.000	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	656.764.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	469.500.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektora t Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	105.510.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	300.334.380	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	10.000.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	27 paket	75.196.599	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	191.096.621	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	-	Inspektora t Daerah sejak tahun 2024 sudah menempati Gedung Baru di Linkungan Perkantoran Raci
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	6 unit	45.510.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	34.041.160	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektora t Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%	556.137.094	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%	785.112.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.455.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	370.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 Laporan	752.700.000	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	3 Laporan	184.637.094	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	3 Laporan	30.957.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektora t Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	1.061.018.140	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	709.888.100	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	799.122.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	411.568.600	
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 Unit	-	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	61.895.540	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	100.319.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90%	5.169.982.980	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90%	1.442.312.500	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100%	4.918.042.980	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100%	1.272.742.500	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	1 Lapo ran	162.560.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	8 Lapo ran	105.810.000	
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	12 Lapo ran	3.413.550.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	8 Lapo ran	75.200.000	
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	55 Lapo ran	98.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	57 Lapo ran	95.250.000	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Lapo ran	74.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	116 Lapo ran	125.045.000	
2.1.5	Pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	16 Lapo ran	96.605.000	Pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	16 Lapo ran	77.300.000	
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Kesep akata n	935.927.980	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Kesep akata n	688.907.500	
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Doku men	137.400.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Doku men	105.230.000	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektora t Daerah	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%	251.940.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%	169.570.000	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Lapo ran	18.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 Lapo ran	39.450.000	
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Lapo ran	233.940.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Lapo ran	130.120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54%	1.047.422.500	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54%	597.853.000	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	100%	25.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	100%	-	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Reko mend asi	25.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Reko mend asi	-	Regulasi sudah terpenuhi
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	1.022.422.500	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	597.853.000	
3.2.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55 peran gkat daera h	672.422.500	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 peran gkat daera h	385.593.000	
3.2.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiat an	175.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiat an	196.510.000	
3.2.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	2 peran gkat daera h	175.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritasi	2 peran gkat daera h	15.750.000	
	JUMLAH				17.239.947.027	JUMLAH				15.629.318.464	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah dikarenakan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sasarannya *tidak melibatkan kelompok masyarakat* dan sesuai dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk mendukung peran APIP sebagai *Consulting*, Inspektorat Daerah sudah memiliki Layanan Pengaduan Masyarakat yaitu Aplikasi SEPAKAT, dimana Masyarakat umum dapat melakukan pengaduan secara online pada aplikasi ini.

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Lembaga pengawasan juga melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan Saber Pungli serta keterkaitan dengan aparat pengawas lainnya seperti BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, KPK, BPK, Inspektorat Propinsi Jawa Timur dan lainnya.

Atas kerjasama dan keterkaitan tersebut sudah diakomodir pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Pasuruan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90%	
1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai Program Kerja	100%	
1.1.1	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	Saber Pungli dengan APH
1.1.2	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	TLHP BPK
1.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/dilakukan pemeriksaan	100%	
1.2.1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	10 Laporan	Audit Investigasi dan Pengaduan Masyarakat
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Pasuruan	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	54%	
2.1	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Pasuruan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	100%	
2.1.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57 perangkat daerah	Pendampingan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP oleh BPKP
2.1.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 kegiatan	MCP KPK

--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selaku instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah seperti kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini sudah ada 1 Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan berpredikat menuju WBK yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Sebagai bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi untuk mendorong upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dua alat ukur dalam menilai kepatuhan pengelola negara pada pencegahan korupsi. Mereka adalah Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). MCP ini meliputi delapan area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa. Selain MCP, KPK juga melakukan pengukuran melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Pengukuran SPI ini bersifat kelembagaan atau organisasi pada K/L atau pemda, yang bertujuan meningkatkan kesadaran

risiko korupsi, perbaikan sistem antikorupsi, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi. Capaian MCP KPK Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 meskipun belum tercapai target, namun ada peningkatan progres capaian dari Tahun 2022 sebesar 85.29% menjadi sebesar 89.11%, sedangkan SPI di Tahun 2023 tercapai sebesar 77,15% ada peningkatan sebesar 3,53% dari tahun 2022.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Inspektorat Daerah mendukung Tujuan 3 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi dengan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah” dan *Sasaran RPD* Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel.

Tujuan dan Sasaran pada Renja 2025 yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, yaitu :

Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah

Indikator Tujuan : 1. Nilai Maturitas SPIP
2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Sasaran : 1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran: 1.1. Nilai Kapabilitas APIP
2.1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Tabel 3.2.A
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

NO.	Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
I	Tujuan				
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pengendalian Internal Pemerintah	1. Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3.147)	Level 3 (3.150)	Level 3 (3.152)
		2. Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	16,74	16,80	16,85
II	Sasaran				
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.010)	Level 3 (3.020)
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	84,15 (A)	85,55 (A)	85,55 (A)

KETERANGAN :

Proyeksi 2024 dan target 2025 pada Indikator Tujuan Nilai Maturitas SPIP sudah menyesuaikan realisasi 2023 karena target pada Renstra sudah tidak relevan.

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

Indikator Sasaran RPD			IKU			
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NILAI SAKIP	nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal	81,40 (A)	Tujuan : Nilai Maturitas SPIP	Nilai Komponen Penetapan Tujuan + Nilai Komponen Struktur dan Proses + Nilai Komponen Pencapaian Tujuan SPIP	Level 3 (3.152)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai SAKIP Pemda Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai maks 25)	16,85	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Sasaran : Nilai Kapabilitas APIP	Skor Komponen Dukungan Pengawasan + Skor Komponen Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan	Level 3 (3.020)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai komponen evaluasi kinerja internal	85,55 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari tujuan nomor 3 RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu ***Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Pemilihan Program dan Kegiatan ini didasarkan pada standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai perannya selaku aparat pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar selalu mentatai hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watchdog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah kabupaten Pasuruan mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat daerah Kabupaten Pasuruan juga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dan kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, professional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi lebih berkualitas.

Dari berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut :

A. Program

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025, dimana Inspektorat sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2025, yaitu 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Pengadaan Mebel.
 - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal :
 - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 3. Reviu Laporan Kinerja.
 - 4. Reviu Laporan Keuangan.
 - 5. Pengawasan Desa.
 - 6. Kerjasama Pengawasan Internal.
 - 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
 - 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

- a. Pendampingan dan Asistensi.
 - 1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas.

C. Lokasi Penyebaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan rancangan rencana kerja Tahun 2025, lokasi pelaksanaan dan penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Inspektorat Daerah khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya serta luar daerah Kabupaten Pasuruan. Dengan kelompok sasaran (Obyek Pemeriksaan) terdiri dari :

Kantor/Dinas/Badan/RSUD	:	33
Kecamatan	:	24
Desa	:	24
Lainnya (Audit Investigasi)	:	10

D. Kebutuhan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar Rp. 15.629.318.464,-.

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah yang mendukung prioritas daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 berikut ini :

Tabel 3.3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	Proyek Strategis
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nilai SAKIP	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak berbasis elektronik	Peningkatan RB Tematik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	-
OPINI BPK				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Program Penyelenggaraan Pengawasan	-

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah tidak ada yang mendukung proyek strategis.

3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah yang mendukung inovasi Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.4 berikut ini :

Tabel 3.3.4
Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah
Tahun 2025

Inovasi	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Anggaran
Aplikasi SEPAKAT https://sepakat.pasuruankab.go.id	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 130.120.000,- <i>untuk kegiatan sosialisasi dan rapat- rapat penyelesaian pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi</i>

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana Kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya tujuan RPD, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi diatas 2 Trilyun paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas 15 Milyar, sehingga Inspektorat Daerah dapat menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Tujuan Pemerintahan Daerah.

Terkait hal tersebut diatas Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2025 sejumlah Rp. Rp. 17.239.947.027,- (Tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH									
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Inspektorat Daerah	100%	13.589.152.964	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	14.324.746.129
60101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	Inspektorat Daerah	100%	392.010.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	371.686.000
6010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	5 laporan	Belanj : a 392.010.000 baran g dan jasa			5 lapora n	371.686.000
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Inspektorat Daerah	100%	9.617.373.277	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	9.737.835.841
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	560 orang- bulan	Belanj : a 9.379.072.593 Pegaw ai			560 orang- bulan	9.379.072.249
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Inspektorat Daerah	7 dokumen	Belanj : a 165.340.684 baran g dan jasa			13 doku men	284.843.592

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6010120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	12 dokumen	Belanj : a 72.960.000 barang dan jasa			12 doku men	73.920.000
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Inspektorat Daerah	100%	936.092.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1.221.478.000
6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Luar Kabupaten Pasuruan	50 Orang	Belanj : a 550.750.000 barang dan jasa			44 Orang	799.400.000
6010120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kabupaten Pasuruan	88 Orang	Belanj : a 385.342.000 barang dan jasa			82 Orang	422.078.000
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	100%	848.343.207	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1.114.765.022
6010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Inspektorat Daerah	4 Paket	Belanj : a 52.633.647 barang dan jasa			2 Paket	37.915.358
6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Inspektorat Daerah	7 Paket	Belanj : a 234.601.480 barang dan jasa			7 Paket	300.290.303
6010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Inspektorat Daerah	8 Paket	Belanj : a 82.008.080 barang dan jasa			2 Paket	110.195.361
6010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Inspektorat Daerah	12 Dokumen	Belanj : a 9.600.000 barang dan jasa			12 Doku men	9.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kabupaten Pasuruan	85 Laporan	Belanja barang dan jasa : 469.500.000			85 Laporan	656.764.000
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	Inspektorat Daerah	100%	300.334.380	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	338.800.420
6010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Inspektorat Daerah	27 unit	Belanja Modal : 75.196.599			1 paket	56.303.000
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Inspektorat Daerah	10 unit	Belanja Modal : 191.096.621			10 unit	248.456.260
6010120709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat Daerah	0 unit	Belanja Modal : -			0 unit	-
6010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan	Inspektorat Daerah	3 unit	Belanja Modal : 34.041.160			10 unit	34.041.160
60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	Inspektorat Daerah	100%	785.112.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	804.381.000
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	Belanja barang dan jasa : 1.455.000			12 Laporan	1.080.000
6010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	Inspektorat Daerah	12 Laporan	Belanja barang dan jasa : 752.700.000			12 Laporan	682.101.000
6010120805	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Inspektorat Daerah	3 Laporan	Belanja barang dan jasa : 30.957.000			3 Laporan	121.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	Inspektorat Daerah	100%	709.888.100	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	735.799.846
6010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Inspektorat Daerah	15 Unit	Belanj : a 411.568.600 baran g dan jasa			15 Unit	445.228.346
6010120905	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Inspektorat Daerah	50 Unit	Belanj : a 100.319.500 baran g dan jasa			50 Unit	87.769.500
6010120906	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Inspektorat Daerah	0 Unit	Belanj : a - baran g dan jasa			10 Unit	5.000.000
6010120900 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Inspektorat Daerah	1 Unit	Belanj : a 198.000.000 baran g dan jasa			1 Unit	197.802.000
60102	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	90%	1.442.312.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		92%	2.038.642.826
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga yang telah dilakukan pengawasan sesuai program kerja	Kabupaten Pasuruan	100%	1.272.742.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	1.600.195.326
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah	Kabupaten Pasuruan	8 Laporan	Belanj : a 105.810.000 baran g dan jasa			8 Lapora n	54.110.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6010220102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Kabupaten Pasuruan	8 Laporan	Belanj : a 75.200.000 Pegaw ai			8 Lapora n	101.463.006
6010220103	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Pasuruan	57 Laporan	Belanj : a 95.250.000 baran g dan jasa			57 Lapora n	106.242.000
6010220104	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Pasuruan	116 Laporan	Belanj : a 125.045.000 baran g dan jasa			116 Lapora n	154.255.000
6010220105	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	Kabupaten Pasuruan	16 Laporan	Belanj : a 77.300.000 baran g dan jasa			16 Lapora n	144.133.200
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kabupaten Pasuruan	1 Kesepaka tan	Belanj : a 688.907.500 baran g dan jasa			1 Kesep akatan	798.002.120
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Pasuruan	4 Dokumen	Belanj : a 105.230.000 baran g dan jasa		Menduku ng Prioritas Daerah	5 Doku men	241.990.000
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Permintaan audit keinvestigasian dan Pengaduan Masyarakat yang terlayani/ dilakukan pemeriksaan	Inspektorat Daerah	100%	: 169.570.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	438.447.500
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Inspektorat Daerah	1 Laporan	Belanj : a 39.450.000 baran g dan jasa			1 Lapora n	76.307.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektorat Daerah	10 Laporan	Belanja barang dan jasa : 130.120.000			10 Laporan	362.140.000
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	Kabupaten Pasuruan	54%	: 597.853.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		56%	936.334.138
60103201	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	Kabupaten Pasuruan	100%	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	25.000.000
6010320101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kabupaten Pasuruan	0 Rekomendasi	Belanja barang dan jasa -			1 Rekomendasi	25.000.000
60103202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	Kabupaten Pasuruan	100%	: 597.853.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	911.334.138
6010320201	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Pasuruan	57 perangkat daerah	Belanja barang dan jasa 385.593.000		Mendukung Prioritas Daerah	57 perangkat daerah	570.814.138
6010320202	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan	196.510.000			12 kegiatan	170.260.000
6010320203	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas	Kabupaten Pasuruan	2 perangkat daerah	Belanja barang dan jasa 15.750.000			2 perangkat daerah	170.260.000
					Total Belanja operasi :				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Pegawai : Rp 9.379.072.593				Rp 9.379.072.249
					Belanja Baran g dan Jasa : Rp 6.250.245.871				Rp 7.920.650.844
					Belanja Bunga : Rp -				Rp -
					Belanja Subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja Hibah : Rp -				Rp -
					Belanja Bantuan : Rp -				Rp -
					Total Belanja modal : Rp -				Rp -
					Total Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Total Belanja transfer : Rp -				Rp -
					Total Belanja PD Rp 15.629.318.464				Rp 17.299.723.093

TABEL 5.1 PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. PASURUAN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						INSPEKTORAT						15.629.318.464,00						16.964.142.073,00		
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						15.629.318.464,00							16.964.142.073,00	
	6	0 1				INSPEKTORAT DAERAH						15.629.318.464,00							16.964.142.073,00	
23 8	6	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase dokumen/lapor an administrasi PD yang baik / sesuai regulasi	100 %			100 %	13.589.152.964,00						100 %	13.984.425.109,00	
	6	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiat an/subkegiata n pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	-			100 %	392.010.000,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah	-	371.686.000,00	
	6	0 1	0 1	2.0 1	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	392.010.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		371.686.000,00	INSPEKTOR AT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasio nal					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	6	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungj awabkan	-			100 %	9.617.373.277,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah	-	9.737.835.841,00					
	6	0	0	2.0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/bu lan	9.379.072.593,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		9.379.072.249,00	INSPEKTOR AT				
	6	0	0	2.0	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	165.340.684,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Inspektorat Daerah		284.843.592,00	INSPEKTOR AT				
	6	0	0	2.0	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	72.960.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	Inspektorat Daerah		73.920.000,00	INSPEKTOR AT				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasio nal					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	6	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	-			100 %	936.092.000,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah	-	890.400.000,00				
	6	0 1	0 1	2.0 5	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	550.750.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		890.400.000,00	INSPEKTOR AT			
	6	0 1	0 1	2.0 5	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				88 Orang	385.342.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesahatan4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTOR AT			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	82.008.080,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		110.195.361,00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2.0 6	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		9.600.000,00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2.0 6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	469.500.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		656.764.000,00	INSPEKTOR AT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasio nal					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	6	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terrealisasi	-			100 %	300.334.380,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah	-	329.557.400,00					
	6	0 1	0 1	2.0 7	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	75.196.599,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		56.303.000,00	INSPEKTOR AT				
	6	0 1	0 1	2.0 7	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	191.096.621,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		150.000.000,00	INSPEKTOR AT				
	6	0 1	0 1	2.0 7	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	34.041.160,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		123.254.400,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor yang tersedia	-			100 %	785.112.000,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah	-	804.381.000,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.455.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		1.080.000,00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2.0 8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	752.700.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		682.101.000,00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2.0 8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	30.957.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		121.200.000,00	INSPEKTOR AT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	-			100 %	709.888.100,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah	-	735.799.846,00	
	6	0	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	411.568.600,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFERR UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		445.228.346,00	INSPEKTOR AT
	6	0	0	2.0	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFERR UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		5.000.000,00	INSPEKTOR AT
	6	0	0	2.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasio nal					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	100.319.500,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		87.769.500,00	INSPEKTOR AT
	6	0 1	0 1	2.0 9	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				1 Unit	198.000.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Inspektorat Daerah		197.802.000,00	INSPEKTOR AT
23 9	6	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90 %			90 %	1.442.312.500,00						90 %	2.038.642.826,00	
	6	0 1	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah/Lemba ga yang telah dilakukan pengawasan sesuai program kerja	-			100 %	1.272.742.500,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN	Perangkat Daerah, Lembaga Sekolah, Desa di Kabupaten Pasuruan	-	1.600.195.326,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasio nal	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	0	1	0	2	0	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah												
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	105.810.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah, Lembaga Sekolah, Desa di Kabupaten Pasuruan		54.110.000,00	INSPEKTOR AT
	6	0	1	0	2	0	002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah												
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				8 Laporan	75.200.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah, Lembaga Sekolah, Desa di Kabupaten Pasuruan		101.463.006,00	INSPEKTOR AT
	6	0	1	0	2	0	003	Reviu Laporan Kinerja												
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				57 Laporan	95.250.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah, Lembaga Sekolah, Desa di Kabupaten Pasuruan		106.242.000,00	INSPEKTOR AT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasio nal	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	6	0	0	2.0	0004	Reviu Laporan Keuangan																
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					116 Laporan	125.045.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah, Lembaga Sekolah, Desa di Kabupaten Pasuruan		154.255.000,00	INSPEKTOR AT		
	6	0	0	2.0	0005	Pengawasan Desa																
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa					16 Laporan	77.300.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah, Lembaga Sekolah, Desa di Kabupaten Pasuruan		144.133.200,00	INSPEKTOR AT		
	6	0	0	2.0	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk					1 Kesepakat an	688.907.500,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah, Lembaga Sekolah, Desa di Kabupaten Pasuruan		798.002.120,00	INSPEKTOR AT		
	6	0	0	2.0	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasio nal	Daerah								
1	2						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	130.120.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah/Des a/Lembaga/ Masyarakat di Kabupaten Pasuruan		362.140.000,00	INSPEKTOR AT				
240	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai A	56			54	597.853.000,00						56	941.074.138,00					
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	-			100 %	0,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Kabupaten Pasuruan	-	25.000.000,00					
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				0 Rekomend asi	0,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N YANG BERDAMPAK DAN	Kabupaten Pasuruan		25.000.000,00	INSPEKTOR AT				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas i Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasio nal					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	6	0	0	2.0		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	-			100 %	597.853.000,00			-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah	-	916.074.138,00					
	6	0	0	2.0	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				57 perangkat daerah	385.593.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah		570.814.138,00	INSPEKTOR AT				
	6	0	0	2.0	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	196.510.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah		175.000.000,00	INSPEKTOR AT				

	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	15.750.000,00	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFERR UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	P3 - Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan 4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK DAN BERBASIS ELEKTRONIK	Perangkat Daerah		170.260.000,00	INSPEKTOR AT

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Catatan Penting yang perlu diperhatikan

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Kode sub kegiatan, kinerja sub kegiatan dan indikator sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (*bottom up*) maupun dari stakeholder terkait diupayakan dapat tertampung lewat Musrenbang Kecamatan ataupun melalui Forum Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang dapat menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Disamping itu, penyusunan Renja Tahun 2025 ini merupakan bagian dari alur pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Perangkat Daerah karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 1. Penyusunan RKA ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

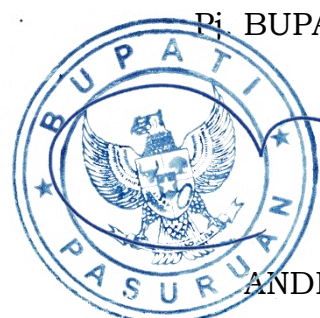
1. Seluruh Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan atau optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala BAPPELITBANGDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
4. Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dana indikatif dan indiator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA dengan Renja Perangkat Daerah.

Pi. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO